

Kebijakan Pengendalian Kegiatan Masyarakat di Masa Covid 19 di Kabupaten Banyuwangi

Fani Alvino¹, Ria Angin²

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jember

¹² Gumuk Kerang, Karangrejo, Sumbersari, Jember Regency, East Java 68124

email: fani Alvino26@gmail.com¹; ria.angin@unmuhjember.ac.id²;

Abstract

The increasing number of cases of the COVID-19 virus in Indonesia has prompted the government to make various kinds of policies, these policies were made to reduce the number or rate of transmission of Covid 19 in Indonesia. Various regions in Indonesia also issue many policies, one of which is in Banyuwangi Regency. Banyuwangi Regency implements pkm as well as micro pkm or imposes restrictions on community activities. This policy is carried out because many people do not understand or do not understand the dangers of not using health protocols when leaving the house, and also many people out there who still like to hang out and be close to each other without applying physical distancing or also called physical distancing. This caused Banyuwangi Regency to become a red zone. And at that time the Baru school had been running for almost 1.5 months, the trial of teaching and learning activities (KBM) face-to-face for SMA / SMK Banyuwangi, had to be stopped again. This is in line with the increasing number of cases of the spread of Covid-19. From the data update announced by the East Java Provincial Government's COVID-19 Task Force, as of Tuesday (15/12) night, Banyuwangi has returned to the red zone, which means it is a high risk area for the spread of the corona virus. And for the next plan, the Banyuwangi district government must further socialize its latest policy, namely controlling community activities so that the Banyuwangi people understand more about the policies that will be implemented and so that Banyuwangi can return to its normal era before it was affected by the Covid-19 virus

Keywords: PKM Policy; COVID-19; Kabupaten Banyuwangi;

Abstrak

Terus bertambahnya kasus virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah membuat berbagai macam kebijakan, kebijakan tersebut dibuat untuk menekan jumlah atau angka penularan covid 19 di Indonesia. Berbagai daerah di Indonesia juga banyak mengeluarkan kebijakan, Salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi menerapkan pkm dan juga pkm mikro atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan karena banyak masyarakat yang kurang mengerti atau kurang paham bahayanya tidak menggunakan protokol kesehatan saat keluar rumah, Dan juga banyak masyarakat diluar sana yang masih suka bergerombol dan saling berdekatan tanpa melakukan anjuran phsikal distancing atau disebut juga jaga jarak fisik. Hal ini membuat Kabupaten Banyuwangi sempat menjadi zona merah. Dan pada saat itu sekolah Baru berjalan hampir 1,5 bulan, uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tatap muka secara langsung untuk tingkat SMA/SMK Banyuwangi, terpaksa kembali dihentikan. Hal ini seiring dengan kembali meningkatnya kasus penyebaran Covid-19. Dari pembaruan data yang diumumkan Satgas COVID-19 Pemprov Jatim, per Selasa (15/12) malam, Banyuwangi kembali masuk zona merah yang berarti menjadi daerah risiko tinggi penyebaran virus corona. Dan untuk rencana selanjutnya pemerintah kabupaten Banyuwangi harus lebih mensosialisasikan kebijakan terbarunya yaitu pengendalian kegiatan masyarakat supaya masyarakat Banyuwangi lebih paham akan kebijakan yang akan diselenggarakan dan supaya banyuwangi bisa kembali ke era normal seperti dulu sebelum terdampak virus covid-19.

Keywords: Kebijakan PKM; COVID-19; Kabupaten Banyuwangi;

*)Penulis Korespondensi

E-mail : ria.angin@unmuhjember.ac.id

Pembahasan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu hingga tingkat RT/RW untuk mengendalikan COVID-19. PPKM Mikro diterapkan mulai 9 hingga 22 Februari

2021. Penerapan PPKM Mikro disesuaikan dengan data perkembangan kasus untuk menekan kasus positif yang semakin banyak di Indonesia.. Tujuan kebijakan PPKM Mikro adalah untuk menekan kasus positif dan menurunkan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Selain itu tentu sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disiapkan skenario pengendalian dengan titik tekan pada level terkecil yaitu di RT/ RW yang ada di Desa/ Kelurahan,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Senin (08/02/2021).

Selanjutnya, Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menambahkan, agar skenario pengendalian lebih terkontrol dengan baik, perlu dibentuk Posko (Pos Jaga) di Desa/Kelurahan, yang melakukan 4 fungsi yaitu Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung operasional penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan. Skenario pengendalian dilakukan dengan memaksimalkan 3T (*Testin, Tracing, dan Treatment*), isolasi pasien positif dan kontak erat, pembatasan mobilitas dan pergerakan serta penyediaan kebutuhan pokok (bantuan beras dan masker). Selain itu, terdapat perubahan kebijakan pengaturan perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional untuk mengendalikan COVID-19.

Pertama, penerapan protokol dan pengaturan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), yaitu pengetatan protokol kesehatan, kewajiban terkait *testing* (RT PCR/Antigen/Genose), pelaksanaan tes acak, dan pembatasan saat libur panjang/keagamaan. Kedua, Penerapan protokol dan pengaturan bagi Pelaku Perjalanan Internasional (PPI), yaitu larangan memasuki wilayah Indonesia bagi PPI WNA (kecuali dengan kriteria tertentu), pengetatan protokol kesehatan, kewajiban terkait *testing* (RT PCR), dan kewajiban karantina terpusat. Selanjutnya, pelarangan bepergian ke luar kota (melakukan perjalanan jauh) bagi ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai/Staf BUMN, dan pekerja swasta, selama masa liburan Tahun Baru Imlek, Sebelumnya di kabupaten Banyuwangi juga menerapkan kebijakan yang hampir sama persis dengan kebijakan ppkm mikro yaitu kebijakan PKM (pengendalian kegiatan masyarakat). Kebijakan ini berdampak baik pada kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi secara perlahan mengalami penurunan angka positif covid terbukti dengan adanya kebijakan ini kabupaten Banyuwangi kembali ke era new normal dan kembali ke zona hijau. Keberhasilan kabupaten Banyuwangi menjadi zona hijau tak luput dari keseriusan satgas covid melakukan tugasnya yang selalu memberikan pengawasan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih waspada dalam melakukan kegiatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengendalian kegiatan kepada masyarakatnya untuk menekan angka covid-19 di kabupaten Banyuwangi dan untuk menjadikan Kabupaten Banyuwangi ke era new normal seperti dahulu sebelum terdapat virus COVID-19. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan tiga informan menggunakan pedoman wawancara, pengumpulan dokumen, dan studi kepustakaan, tehnik memilih subyek penelitian yang dilakukukan secara purposive dengan dua subyek diantaranya. Satgas pelaksana Kecamatan Glenmore saya melakukan wawancara pada satgas Glenmore karena rumah saya berada di Kecamatan Glenmore, dan yang kedua yaitu satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi

Hasil dan Pembahasan

Satgas Covid 19 Banyuwangi terus bekerja keras menekan penyebaran covid 19 melalui pelaksanaan PPKM mikro. Dari total 10.608 RT, lebih dari 99 persen-nya kini

berada di zona hijau, yang artinya di kawasan RT tersebut bebas kasus covid 19. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah dalam rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Selasa (9/3/2021), dan diikuti para kepala daerah se Provinsi Jatim. Sugirah menerangkan bahwa semenjak diberlakukan PPKM, zona RT yang berubah menjadi hijau terus meningkat. Per 8 Maret 2021, dari total ada 10.608 RT, kini yang berada di zona hijau mencapai 10.521 RT. Sisanya yang 87 RT masih di zona kuning, yang artinya masih ada kasus covid 1 - 5 rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir.

"Alhamdulillah semua bergerak masuk ke zona hijau. Ini berkat kedisiplinan warga pada protokol kesehatan yang terus meningkat. Dan juga kerja keras semua pihak termasuk Satgas covid 19 yang terus melakukan penanganan dan pencegahan covid 19," kata Sugirah. Pemberlakuan PPKM mikro ini turut membawa dampak positif, menurunnya angka terkonfirmasi positif secara signifikan. Sebelum penerapan PPKM, terhitung dari 12 Januari - 8 Februari 2021, konfirmasi positif 688 kasus. Setelah pemberlakuan PPKM yakni per 9 Februari - 8 Maret 2021, konfirmasi pasien positif covid menurun 434 kasus, atau turun 36,92 persen. Begitu pula untuk kasus meninggal. Sebelum PPKM, ada 61 kasus, dan setelah PPKM ada 35 kasus, atau menurun 42,62 persen. Kami selaku pemerintah daerah akan terus mengawal PPKM Mikro ini hingga kasus covid 19 benar-benar teratasi," tandas Sugirah.

Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Banyuwangi dan seluruh stakeholders terkait. Saya harap semua pihak terus bekerja keras untuk menangani covid 19 ini. Dan jangan bosan mengingatkan dan mendukung masyarakat," pesan Heru. Wakil Ketua I Satgas COVID-19 Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin mengatakan selama 5 hari kegiatan PPKM Mikro di Banyuwangi, penularan COVID-19 di Banyuwangi bisa ditekan. "Jumlahnya (penularan COVID-19) tidak sampai banyak. Masih puluhan di 1,6 juta warga Banyuwangi. Terus kita optimalkan," ujarnya kepada detikcom, Minggu (14/2/2021). TIME "Rata-rata warna zona untuk RT dan RW masih masuk kategori hijau dan kuning. Sesuai dengan surat Gubernur, penerapan pendisiplinan protokol kesehatan akan diterapkan sesuai dengan klasifikasi warna tersebut," tambahnya.

Kategori zona itu, kata Arman, jika zona kuning terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif COVID-19, sementara zona hijau tidak ditemukan adanya COVID-19 di RT atau lingkungan tersebut. Kita melaksanakan koordinasi dengan 3 pilar sampai tingkat RT. Untuk zona kuning, berarti ada 1 sampai 5 rumah yang terkonfirmasi positif. Nanti tugas dari 3 pilar sampai tingkat RT ikut melakukan pelacakan kontak erat dan isolasi bagi yang positif," jelasnya. Selain itu, Arman juga mengatakan akan kembali mengaktifkan Kampung Tangguh untuk bisa mendukung PPKM. Sebelumnya sudah ada 33 Kampung tangguh yang sudah terbentuk. Rencananya akan dikembangkan lagi 217 kampung tangguh lainnya.

Pengetian PPKM mikro dan pkm (pengendalian kegiatan masyarakat)

Ppkm adalah sebutan untuk (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang sekarang sering disebut ppkm mikro. Ppkm mikro akan dilaksanakan pada tanggal 9 februari tahun 2021 menurut keputusan Presiden bahwa pada tanggal tersebut akan dilaksanakan ppkm skala mikro. Dalam penerapan ppkm mikro ini alexander selaku TNI (Purn) mengajukan setiap desa dapat mendirikan posko tanggap covid-19. Posisi posko ini menjadi pelengkap upaya pemerintah untuk menekan atau menanggulangi penyebaran di wilayah hulu. Seperti di Kabupaten Banyuwangi posko tanggap covid yang saya ketahui berada dipintu masuk kearah Banyuwangi yaitu berada di Timbangan di kecamatan kalibaru sehingga orang yang dari luar kota melakukan pengecekan disitu.

Dan Baru-baru ini ada kabar bahwa ppkm mikro akan segera diperpanjang Dalam upaya untuk terus menekan laju penularan pandemi COVID-19, Pemerintah

kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang akan diberlakukan dari tanggal 18 sampai 31 Mei 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta. "Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap VIII yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei (2021) akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pascamudik Hari Raya Lebaran dan tentu pengetatan dari 3T ([tracing, testing, dan treatment]," ujarnya

Untuk pengertian pkm sendiri banyak orang yang kurang paham akan hal ini karena ini kebijakan yang dikeluarkan Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya PPKM mikro pkm sendiri kepanjangan dari (pengendalian kegiatan masyarakat), Pembatasan ini berkonsentrasi pada kegiatan masyarakat contoh seperti acara pernikahan acara hari hari besar dan lain lain, Kebijakan ini juga membatasi jam operasional destinasi wisata, warung, rumah makan, tempat hiburan hal tersebut dilakukan untuk menekan angka covid-19 di kabupaten Banyuwangi

Faktor penghambat dan keberhasilan pelaksanaan pkm (pengendalian kegiatan masyarakat) di Kabupten Banyuwangi

Menurut saya faktor penghambat dari kebijakan ini adalah kurang pemahannya masyarakat apa itu pkm mikro, Dan juga peran pemerintah dalam hal sosialisasi juga kurang, pemerintah hanya memberikan teguran kepada pelanggar, seperti warung yang buka sampai larut malam dan juga tempat hiburan yang ramai, Mereka hanya menegur bahkan memberikan sanksi yang tegas tetapi kurang sosialisasi, Seperti warung yang dipaksa tutup mereka tidak tahu dampaknya bagi penjual yang sudah mengeluarkan modal untuk berjualan tetapi dagangannya belum laku mereka dipaksa tutup kesenjangan kebijakan seperti ini yang membuat kebijakan ini menjadi terhambat.

Untuk keberhasilan pelaksanaan pkm pemerintah daerah kabupaten banyuwangi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 merumuskan kebijakan baru melalui surat edaran untuk mengendalikan penularan virus COVID-19 di Banyuwangi. Sejumlah aturan baru diperketat menyesuaikan adanya Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/7/KPTS/031/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun Banyuwangi tidak termasuk daerah yang dilakukan pembatasan, namun kita harus menyesuaikan. Mengingat saat ini masih terjadi penularan virus di masyarakat dimana tidak hanya jumlah kasus positif saja yang bertambah tapi jumlah kasus kematian juga masih terjadi," ujar Sekretaris Satgas COVID-19 Banyuwangi, Mujiono. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengeluarkan beberapa aturan untuk tercapainya keberhasilan Pkm dan juga PPKM skala mikro.

1. Jam Operasional Wisata Hingga Warung Dibatasi

Mujiono mengatakan, sejumlah aturan baru melalui rapat koordinasi dengan Forpimda sebagian besar terkait pengetatan jam operasional mulai dari destinasi wisata, mal, toko modern, dan pusat perbelanjaan. Ada sejumlah ketentuan yang disepakati Satgas, khusus destinasi wisata yang sebelumnya ditutup semua, sekarang boleh beroperasi namun dengan pengaturan jam operasional, yakni antara pukul 10.00 sampai 15.00 WIB,

2. Menginap di Hotel Tetap Wajib Rapid-Test

Selain itu, untuk mal, toko modern, dan pusat perbelanjaan juga dibatasi buka mulai pukul 10.00 sampai 18.00 WIB. Pengaturan serupa juga akan diberlakukan untuk tempat hiburan dan karaoke, yakni buka mulai pukul 10.00 sampai 18.00 WIB. Untuk ruang terbuka hijau dibuka mulai pukul 10.00 sampai 15.00 WIB.

Sedangkan untuk hotel, pengunjung tetap harus menunjukkan hasil rapid test antigen negatif," Mulai berlaku Rabu besok. Sejumlah aturan baru tersebut, kata Mujiono, akan mulai berlaku pada Rabu, 13 Januari 2021. Saat ini, pihaknya sedang mensosialisasikan aturan baru ke tingkat kecamatan di Banyuwangi. Rencananya bila tidak ada perubahan, SE terbaru itu akan mulai diberlakukan pada Rabu besok," ujarnya. Selain itu, Mujiono menjelaskan terkait operasi yustisi penegakan protokol kesehatan juga terus berlanjut, terutama di kawasan pintu masuk perbatasan kota. Operasi yustisi tetap akan digalakkan dengan sinergi Pemkab bersama TNI/Polri. Satgas juga mengaktifkan kembali check poin di sejumlah pintu masuk daerah supaya kabupaten kita tetap terjaga.

Kesimpulan

Kebijakan PKM (pengendalian kegiatan masyarakat) memunculkan pro dan kontra bagi masyarakat Banyuwangi. Kebijakan ini bagi para aparat pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dinilai berdampak baik bagi Masyarakat Banyuwangi, Memang terbukti Kabupaten banyuwangi yang awalnya zona merah kini beransur membaik menjadi zona hijau, Aparat pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terus memaksakan agar Kabupaten Banyuwangi Kembali ke era new Normal, Hal itu bertujuan untuk mengangkat perekonomian banyuwangi yang turun untuk menjadi Normal kembali, Hal itu bertujuan untuk segera era new normal supaya pariwisata Kabupaten Banyuwangi bisa dibuka seluruhnya karena Pendapatan Kabupaten Banyuwangi banyak yang dari faktor pariwisata, dan untuk masyarakatnya sendiri banyak yang belum tahu tentang pkm (pengendalian kegiatan masyarakat) kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah membuat masyarakat masih serig bergerombol dan masih banyak warung dan tempat hiburan buka sampe larut malam sehingga harus dipaksa tutup.

Ucapan Terimakasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jember.

Daftar Pustaka

<https://www.merdeka.com/peristiwa/banyuwangi-masuk-zona-merah-covid-19-uji-coba-sekolah-tatap-muka-dihentikan.html>

<https://setkab.go.id/tekan-kasus-covid-19-pemerintah-terapkan-ppkm-berbasis-mikro-mulai-9-februari/>

<https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/penerapan-ppkm-mikro-dinilai-efektif-turunkan-khttps://>

setkab.go.id/pemerintah-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-31-mei-dan-lakukan-pengetatan-3tasus-konfirmasi-covid-19-di-banyuwangi.html

<https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/penerapan-ppkm-mikro-dinilai-efektif-turunkan-kasus-konfirmasi-covid-19-di-banyuwangi.html>